

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan mengenai data keuangan atau aktivitas operasional perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan. Perusahaan dapat menunjukkan peningkatan eksistensi kinerja mereka dalam kurun waktu tertentu melalui pelaporan keuangan (Chyntia, 2016). Laporan keuangan akan berfungsi maksimal apabila disajikan sesuai dengan unsur-unsur kualitatifnya, antara lain: mudah dipahami, andal, dapat dibandingkan (*comparable*), dan relevan. Laporan keuangan disajikan kepada para pemegang kepentingan (*stakeholder*) yaitu: pihak manajemen, karyawan, investor (*holder*), kreditor, suplier, pelanggan, maupun pemerintah. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan ekonomi laporan keuangan dipengaruhi banyak faktor, antara lain: keadaan perekonomian, politik dan prospek industri. Komponen laporan keuangan yang diterapkan di Indonesia sudah semakin komprehensif (Kennedy, 2014).

Tertuang dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 mengenai tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

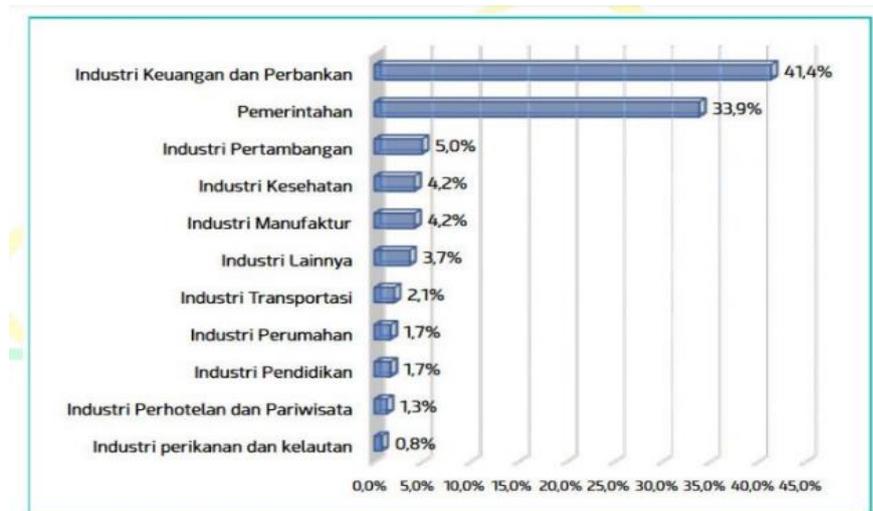
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Namun terkadang hasil kinerja yang tertuang dalam laporan keuangan lebih bertujuan untuk mendapatkan kesan “baik” dari berbagai pihak. Dorongan atau motivasi untuk selalu terlihat baik oleh berbagai pihak sering memaksa perusahaan untuk melakukan manipulasi di bagian-bagian tertentu, sehingga pada akhirnya menyajikan informasi yang tidak semestinya dan tentunya akan merugikan banyak pihak. Ada banyak celah dalam laporan keuangan yang dapat menjadi ruang bagi manajemen dan oknum tertentu untuk melakukan kecurangan (*Fraud*) pada laporan keuangan (Kennedy, 2014).

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan sering disebut dengan *fraud*, dan praktik kecurangan pelaporan keuangan itu tersendiri lebih dikenal dengan *fraudulent financial reporting*. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan (Kennedy, 2014). Praktik kecurangan pelaporan keuangan bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Banyak pihak yang merasa terugikan karena mereka mendapatkan informasi yang tidak semestinya. Kerugian mungkin lebih dirasakan oleh para investor karena keputusan yang mereka ambil sudah bersifat tidak rasional dan berdampak terjadinya kegagalan mendapatkan return dari aktivitas investasi yang dilakukan. *Fraud* tidak hanya akan merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor, namun

juga dapat mengotori nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri. Jajaran manajemen puncak tentu akan menjadi pihak yang paling dituntut pertanggungjawabannya atas timbulnya situasi yang merugikan banyak pihak ini. Proses audit yang berlangsung pada periode tersebut tentunya juga akan turut dipertanyakan, mengapa auditor yang seharusnya mampu memberikan keyakinan atas materialitas informasi dapat gagal mendeteksi adanya kecurangan (Chyntia, 2016).

Menurut (Said et al., 2017) *fraud* ialah perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan untuk kepentingan individu maupun kelompok yang menyebabkan kerugian finansial maupun non-finansial kepada pihak lain. *Fraud* dapat terjadi dimana pun tanpa kenal orang, waktu maupun tempat, bahkan hal ini dapat terjadi di dunia akademik sekali pun.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2018) telah melakukan penelitian terkait *fraudulent financial reporting* pada sektor perbankan dan layanan finansial yang menunjukkan bahwa sektor ini banyak melakukan *fraud* dengan 338 kasus, oleh karena itu sektor perbankan dan layanan finansial menyebabkan kerugian yang besar. ACFE menyatakan pada tahun 2019 bahwa industri perbankan merupakan industri yang paling rugikan karena adanya kasus *fraud* sebesar 41,4%. Persentase ini merupakan dari keseluruhan jenis industri yang ada di Indonesia. Berikut gambar grafik industri yang dirugikan akibat fraud:



Gambar 1.1 Jenis Industri yang Paling Dirugikan Karena *Fraud*

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners*

Kasus *fraudulent financial reporting* besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Century dan kasus Citybank Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengatur sedemikian ketat peraturan bagi sektor perbankan agar tidak terjadi aksi kecurangan. Apabila dianalisis secara umum, kecurangan akan terus bermunculan akibat kurangnya fungsi pencegahan dan deteksi pada suatu entitas (Annisa et al., 2016).

Fraud pentagon merupakan teori yang dikemukakan oleh (Horwarth, 2011), teori ini merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya yaitu *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Teori ini mengasumsikan ada 5 (lima) hal yang selalu ditemukan dalam kasus *fraudulent financial reporting* yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). *fraud* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor tekanan (*pressure*). Hal inilah yang mendorong

seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*, bahkan menimbulkan faktor pendorong lain dalam melakukan *fraud*. Contohnya ketika seseorang telah melakukan *fraud*, secara tidak langsung akan timbul rasionalisasi, yaitu pembenaran akan perbuatan yang telah dilakukannya.

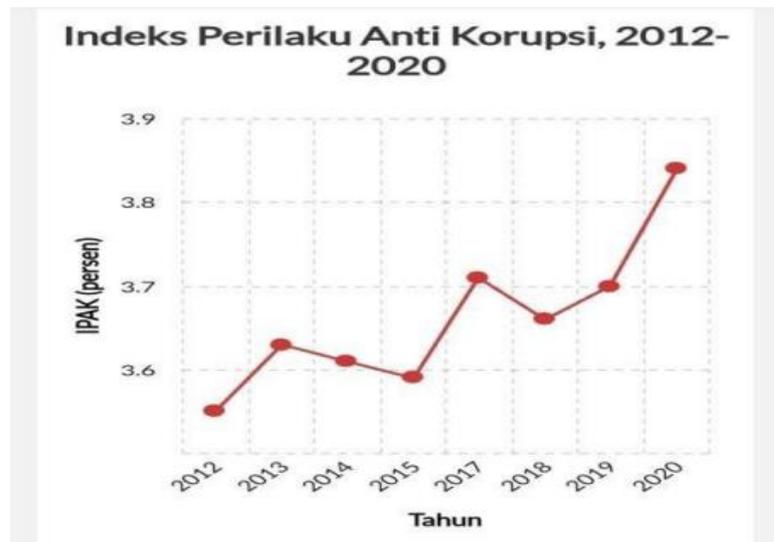
Berdasarkan SAS No. 99 juga *pressure* (tekanan) dapat dijelaskan dengan beberapa pengukuran yaitu *Financial target*, *financial stability*, *personal nasional needs* dan *external pressure*. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua kondisi yang tertera pada SAS No. 99 yaitu *Financial target* dan *external pressure*. Oleh karena itu, unsur *pressure* pada *Pentagon Fraud* dapat diproksikan menggunakan *financial target* dan *external pressure*. Sumber pendanaan perusahaan terbagi menjadi dua yaitu ekuitas dan utang. Ketika perusahaan memiliki utang, maka adanya hubungan dengan pihak luar perusahaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan *external pressure* bagi perusahaan itu sendiri yang dialami oleh orang yang berwenang terhadap operasional perusahaan yaitu manajemen. Rasio yang relevan dengan utang adalah *leverage*, oleh karena itu pada penelitian ini tekanan eksternal diproksikan dengan *ratio leverage* yang berarti membandingkan antara total liabilitas dengan total aset. Menurut teori keagenan (Jensen & Meckling, 1979) tekanan eksternal merupakan salah satu penyebab terjadinya *fraudulent financial reporting*. Tekanan eksternal ini berupa tekanan yang ditujukan pada manajemen perusahaan dalam memenuhi harapan pihak ke tiga dari luar perusahaan.

Unsur kedua dalam *Pentagon Fraud* adalah *opportunity* (kesempatan), kemudian *opportunity* ini dapat diproksikan menggunakan *ineffective monitoring*. Sebenarnya segala macam bentuk kecurangan dapat diminimalisir apabila

perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Namun, apabila pengendalian internal kurang baik, maka perusahaan akan rentan mengalami tindakan kecurangan. Kondisi yang menggambarkan sistem pengendalian yang kurang baik dan kurang efektif disebut dengan *ineffective monitoring*. Kondisi ini terjadi akibat adanya seseorang atau kelompok yang bebas dari pengawasan direksi atas laporan keuangan sehingga terbukanya celah untuk melakukan *fraudulent financial reporting* karena terbukanya *opportunity*. Pada penelitian ini peneliti hanya menerapkan tiga variabel yaitu *financial target*, *external pressure*, dan *ineffective monitoring*.

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang termasuk pelanggaran yang sulit terdeteksi karena biasanya orang akan bekerja sama dalam melakukan *fraud* ini. Setiap negara pasti memiliki tingkat korupsi yang berbeda-beda, informasi dan data mengenai tingkat korupsi dapat dilihat dan dibandingkan dengan mengakses *Corruption Perception Indeks (CPI)*. *Transparency International (TI)* merupakan sebuah lembaga anti korupsi yang dibentuk oleh pihak swasta, TI membuat CPI agar menciptakan dunia yang bebas korupsi.

Perlahan tapi pasti skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun ini, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Hal ini didukung oleh data yang bersumber dari Badan Statistika Nasional tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi tahun 2019. Berikut grafik mengenai Indeks Perilaku Anti-Korupsi tahun 2019:



Gambar 1.2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2012 s.d. 2020

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 yakni 3,84 atau meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,70. Angka ini pada skala 0 sampai 5, artinya semakin mendekati angka 5 maka, masyarakat semakin berperilaku anti terhadap korupsi dan sebaliknya. Sejak tahun 2012 hingga 2020, IPAK Indonesia mengalami fluktuatif. IPAK ini menggunakan dua dimensi yakni dimensi persepsi dan pengalaman. Tahun 2019 nilai indeks persepsi yakni 3,68 dan indeks pengalaman yakni 3,91.

Salah satu praktik kecurangan laporan keuangan pada bidang perbankan dilakukan oleh Bank Bukopin. Bank Bukopin pada tahun 2018 terbukti telah memanipulasi laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin pada tahun 2016 merevisi laba bersihnya yang sebelumnya sebesar Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 triliun (Rachman, 2018). Selain itu, praktik kecurangan laporan keuangan terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN). Komisi IX DPR memanggil Direktur Utama Bank Tabungan

Negara pada hari Senin, 3 Februari 2020 terkait praktek window dressing atau manipulasi laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 2018. Bank Tabungan Negara melakukan pemolesan laporan keuangan yang berupa penjualan kredit bermasalah perusahaan kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) serta memberikan kredit kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait penjualan tersebut. Bank Tabungan Negara (BTN) juga melakukan praktik window dressing yang terbukti dengan adanya pemberian kredit pada termin pertama senilai Rp 100 miliar yang tidak sesuai peruntukannya serta adanya penambahan kredit kepada PT Batam Isldan Marina (BIM) senilai Rp 200 miliar (Kompas.com, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, terdapat gap antara teori dengan praktik. Berdasarkan teori, seorang manajemen diharapkan memiliki integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan setiap tugasnya sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap profesinya. Tetapi, praktiknya tak sedikit oknum manajemen yang mudah terprovokasi dan terpengaruh untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pada praktiknya terdapat perbedaan antara jumlah kasus yang tercatat oleh ACFE dan yang tercatat oleh BPS. ACFE menyatakan bahwa angka korupsi masih tinggi yaitu 70%, sedangkan BPS menyatakan IPAK menurun pada tahun 2019.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, kasus kecurangan pada profesi manajemen marak terjadi, sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Kedua, berdasarkan penelitian ACFE tahun 2019 bahwa industri keuangan dan perbankan

merupakan industri yang paling dirugikan akibat adanya fraud sebesar 41,1%. Angka tersebut dapat dikatakan tinggi, sehingga perlu dilakukan penelitian penyebab tingginya angka fraud di industri perbankan. Ketiga, terdapat gap antara teori dengan praktiknya. Keempat, hasil penelitian ini memungkinkan membantu berbagai pihak seperti, akuntan, manajemen dan IAPI dalam melakukan tindakan preventif untuk terjadinya fraud di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul pada penelitian ini sebagai “**Analisis Pengaruh *Pentagon Fraud Terhadap Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2022***”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dimana *pentagon fraud* diproksikan menjadi 3 bagian yaitu *financial target*, *external pressure*, dan *ineffective monitoring*. Untuk itu, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Pentagon Fraud* yang diproksikan *Financial target* mempunyai pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
2. Bagaimana pengaruh *Pentagon Fraud* yang diproksikan *external pressure* mempunyai pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
3. Bagaimana pengaruh *Pentagon Fraud* yang diproksikan *ineffective monitoring* mempunyai pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu menemukan bukti empiris mengenai hal berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *Pentagon fraud* yang diproksikan pada *Financial target* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2015-2022.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *Pentagon fraud* yang diproksikan pada *external pressure* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2015-2022
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *Pentagon fraud* yang diproksikan pada *ineffective monitoring* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2015-2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, baik bagi kepentingan pengembangan program bagi akademis maupun bagi praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini, dimaksudkan agar memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu Akuntansi khususnya dalam bidang Audit sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang baru tentang implementasi pengaruh *Pentagon Fraud* dalam mendeteksi *Fraud* pada sektor perbankan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Akademis

Manfaat yang berikan bagi para akademisi adalah dapat memberikan wawasan juga pengetahuan lebih lanjut bagi peneliti terhadap pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi *fraudulent financial reporting*.

b. Bagi Instansi

1. Akuntan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akuntan sebuah informasi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mencegah dan meminimalisir tindakan *fraud* pada profesi akuntan.

2. Manajemen

Begitu pula peneliti berharap dari dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada manajemen sebuah informasi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mencegah dan meminilisir tindakan *fraud* pada profesi akuntan dengan cara memperkuat dan memperketat pengendalian internal perusahaan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan tambahan ilmu serta bahan informasi lebih lanjut guna menjelaskan tindakan *fraud* terkhusus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

